

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU 2016



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI MALUKU 2016

| | | |
|-------------------------|---|--|
| ISBN | : | |
| No. Publikasi | : | 81550.1719 |
| Katalog | : | 4301002.81 |
| Ukuran Buku | : | 14,8 cm x 21 cm |
| Jumlah Halaman | : | vi + 33 halaman |
| Naskah | : | Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik |
| Pengarah | : | Kepala BPS Provinsi Maluku |
| Editor | : | Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik |
| Penulis | : | Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik |
| Gambar Kulit | : | Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik |
| Diterbitkan Oleh | : | © Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku |
| Dicetak Oleh | : | Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku |

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



KATA PENGANTAR

Publikasi ini merupakan hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Maluku melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data sekunder dari instansi terkait lainnya.

Menyadari adanya berbagai keterbatasan, BPS Provinsi Maluku terus berusaha menyediakan data, menerbitkan publikasi, serta memberikan ulasan berbagai data hasil survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipahami bagi para pengguna.

Diharapkan, publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan perencanaan dalam menyusun berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, menuju peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Kami menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima kasih.

Ambon, Desember 2017

Kepala,

DUMANGAR HUTAURUK

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GRAFIK | v |
| RINGKASAN | 1 |
| PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Ruang Lingkup | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sumber data | 7 |
| DAFTAR ISTILAH | 8 |
| KONDISI PENDIDIKAN MALUKU 2016 | 20 |
| 3.1 Angka Melek Huruf | 22 |
| 3.2 Pendidikan Anak Usia Dini | 23 |
| 3.3 Partisipasi Sekolah | 26 |
| 3.4 Rata-rata lama Sekolah | 30 |
| 3.5 Tingkat Pendidikan | 31 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut kelompok umur, 2016 | 27 |
| Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016 | 29 |
| Tabel 3. Rata-rata lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2016 | 31 |
| Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal, 2016 | 32 |

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.** Angka Melek Huruf Penduduk umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Maluku, 2016 23
- Grafik 2.** Persentase Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah Penduduk 0-6 Tahun di Maluku, 2016 25

<https://maluku.bps.go.id>

RINGKASAN

1. Angka Melek Huruf (AMH) Maluku pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. AMH naik dari 98,85 persen menjadi 98,94 persen.
2. AMH penduduk laki-laki mencapai angka 99,27 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan AMH penduduk perempuan sebesar 98,61 persen.
3. Lebih dari tiga perempat yakni 79,66 persen penduduk Maluku umur 0-6 tahun tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah, 11,47 persen masih/pernah mengikuti pra sekolah TA 2015/2016, sedangkan 8,87 persen pernah mengikuti pra sekolah TA 2014/2015 atau sebelum TA 2014/2015.
4. Rasio murid-guru di Maluku sudah cukup baik. Untuk Sd/Sederajat rasio murid-guru sekitar 1; sedangkan rasio murid-guru untuk SMP/Sederajat sekitar 12; rasio murid-guru

untuk SMA/Sederajat sekitar 13. Kemudian untuk rasio murid-kelas tingkat SD/Sederajat sekitar 20, untuk SMP/Sederajat sekitar 24, dan untuk SMA/Sederajat sekitar 28.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun mencapai 99,39 persen, APS untuk umur 13-15 tahun mencapai 96,60 persen, dan APS sebesar 78,19 persen untuk kelompok umur 16-18 tahun.
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 109,69, APK SMP 91,33 SMA 92,42 PT 39,34.
7. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD (7-12 tahun) adalah sebesar 94,50 persen, APM SMP (13-15 tahun) sebesar 73,40 persen, dan APM SMA (16-18 tahun) sebesar 63,49 persen.
8. Rata-rata Lama Sekolah di Maluku pada tahun 2016 adalah 9,27 tahun. Pada tahun yang sama harapan penduduk Maluku

yang berumur 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 13,73 tahun.

9. Penduduk Maluku berumur 15 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan sekolah dasar adalah sekitar 9,87 persen, sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai bangku sekolah dasar adalah sebesar 28,39 persen. Persentase teratas pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Maluku adalah jenjang SMA sebesar 34,05.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tercantum pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 artikel 26. Bahkan di Indonesia, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bahkan sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Arah dari pasal tersebut adalah pemerintah bertugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem

tersebut diatur melalui jalur formal, bukan formal, dan informal yang sifatnya saling melengkapi dan memperkaya. Jalur formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), pendidikan menengah (SM/ sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma/ Sarjana/ Magister/ Spesialis/ Doktor). Pendidikan bukan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu, pendidikan informal diperoleh dari keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi setiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau, bermutu dan berkualitas. Dalam menyusun berbagai kebijakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat disajikan berbagai indikator pendidikan yang mampu menjadi alat perencanaan maupun evaluasi program pemerintah dalam bidang pendidikan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan publikasi ini adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi Maluku dan sarana pendidikan yang tersedia di Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bidang pendidikan di Maluku bagi pengguna data baik di lingkup pemerintah ataupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran terkait kondisi dan perkembangan Provinsi Maluku dalam bidang pendidikan secara rinci dan menyeluruh menurut aspek jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, dan tingkat pendidikan,
2. Menyajikan data dan informasi di bidang pendidikan melalui beberapa indikator pendidikan, serta
3. Menjadi pedoman awal bagi pemerintah dan juga swasta dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah Indikator pendidikan diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016; data jumlah sarana pendidikan dan pendukungnya diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

<https://maluku.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH

Bersekolah adalah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain. Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal;

Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan **masih** bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan **masih** bersekolah.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan:

1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah

Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST,SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs).

2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
 - a. *Program gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
 - b. *Program non-gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan.

Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV(D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki:

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi

Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa

(SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

Program D.I/II adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

Contoh:

- a. Akademi Seni Musik Indonesia
- b. Akademi Seni Tari Indonesia
- c. Akademi Bahasa Asing
- d. Akademi Pimpinan Perusahaan
- e. Akademi Kimia Analis
- f. Akademi Meteorologi dan Geofisika

Program D.IV/SI adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

SMA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Kemampuan Membaca dan Menulis

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat “*Anda harus berlaku adil*”;

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang

bersekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu

<https://maluku.bps.go.id>

KONDISI PENDIDIKAN MALUKU

TAHUN 2016

Dalam konvensi internasional *Education for All (EFA)* di Dakar Senegal pada tahun 2000, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut, konvensi yang bertujuan untuk membantu pengambil kebijakan di seluruh negara dalam memenuhi kebutuhan penduduk terhadap pendidikan memuat kesepakatan berupa enam tujuan yang harus dicapai yaitu:

1. Memperluas dan mengembangkan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh, khususnya untuk anak yang kurang beruntung;
2. Memastikan bahwa semua anak, terutama anak perempuan, anak yang dalam situasi sulit, dan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik tanpa pungutan biaya.
3. Menjamin akses pembelajaran dan pendidikan kecakapan hidup yang merata untuk semua orang.

4. Meningkatkan angka melek huruf orang dewasa khususnya perempuan, sebesar 50 persen, dan pemerataan akses pendidikan dasar dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan berfokus pada akses penuh dan merata serta pendidikan dasar yang berkualitas baik untuk anak perempuan;
dan
6. Mengembangkan dan menjamin seluruh aspek mutu pendidikan sehingga dihasilkan *outcome* pendidikan yang dapat diukur dan diakui, terutama dalam hal baca tulis, angka, dan kemampuan dasar lain. Sebelum konvensi tersebut, komitmen Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk terlihat melalui berbagai program pendidikan seperti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR) pada tahun 1994 dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2000.

Kemudian salah satu tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rencana Strategis 2015 -2019 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan

berkebutuhan khusus. Terwujudnya tujuan tersebut ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut.

1. APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70 persen.
2. AMH penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10 persen.
3. APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55 persen.
4. APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20 persen.
5. APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77 persen.

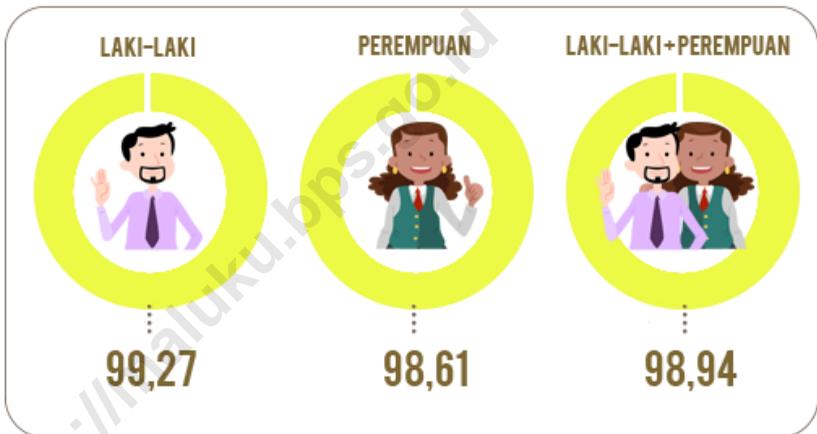
3.1 ANGKA MELEK HURUF

Penduduk dikatakan melek huruf jika seseorang tersebut paling tidak bisa menggunakan kemampuan membaca dan menulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan kemampuan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program pemberantasan buta huruf.

Pada tahun 2016, Angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas di Maluku mengalami peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2015. AMH naik dari 98,85 persen menjadi 98,94 persen.

Grafik 1. Angka Melek Huruf Penduduk umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Maluku, 2016



3.2 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, sehingga setiap warga harus mengenyam pendidikan, dimulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur empat tahun.

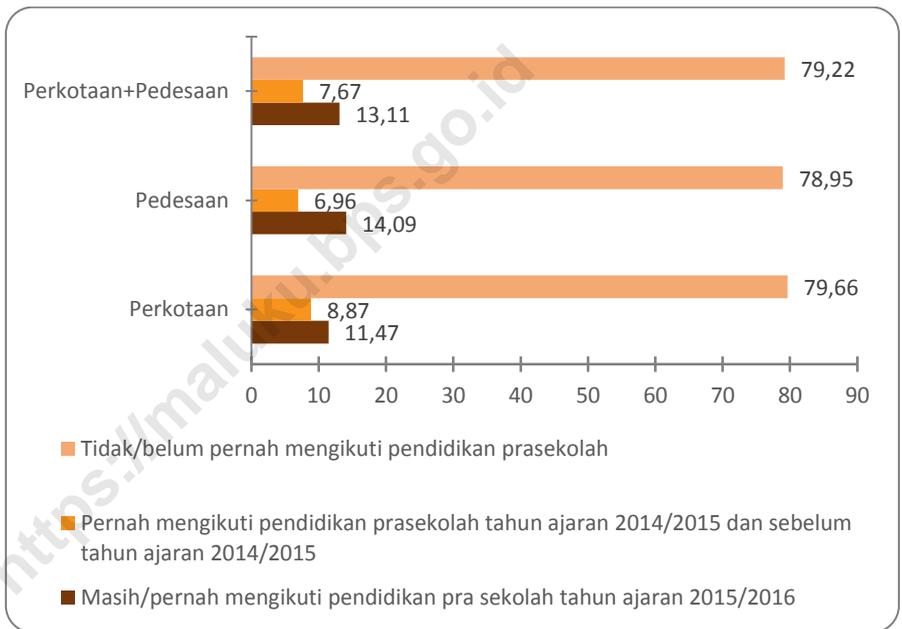
Sehingga ini adalah periode paling penting dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berikutnya hingga anak tumbuh dewasa.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini (pra sekolah) bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pada tahun 2016, Lebih dari tiga perempat yakni 79,22 persen penduduk Maluku umur 0-6 tahun tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah, 13,11 persen masih/pernah mengikuti pra sekolah TA 2015/2016, sedangkan 7,67persen pernah mengikuti pra sekolah TA 2014/2015 atau sebelum TA 2014/2015. Jika dilihat menurut tempat tinggal sebanyak 11,47 persen penduduk umur 0-6 tahun di perkotaan masih/pernah mengikuti pra sekolah tahun 2015/2016 lebih rendah dibandingkan dengan daerah pedesaan dengan

persentase mencapai 14,09 persen, sebanyak 8,87 persen penduduk pernah mengikuti pra sekolah TA 2014/2015 dan sebelum TA 2015/2016 di perkotaan dan sebanyak 6,96 persen di perkotaan.

Grafik 2. Persentase Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah Penduduk 0-6 Tahun di Maluku, 2016



Jika dilihat secara keseluruhan, partisipasi anak usia 0-6 tahun dalam pendidikan pra sekolah di Maluku masih rendah, hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini dan juga faktor ekonomi menjadi

penyebab lainnya. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini.

3.3 PARTISIPASI SEKOLAH

Salah satu ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah adalah angka partisipasi sekolah. Ukuran ini banyak digunakan dalam sektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid yang lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya penduduk dengan umur sekolah yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur sekolah yang bertambah serta poeningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah menjadi tidak berubah atau justru menurun.

Salah satu kesepakatan dalam konvensi EFA yang turut ditandatangani Indonesia adalah menuntaskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua anak, supaya tercapai mulai tahun 2005 dan selambat-lambatnya tahun 2015 (Unesco, 2000). Dukungan

pemerintah Indonesia terhadap konvensi tersebut dituangkan melalui PP No.47 Tahun 2008 mengenai program wajib belajar.

. Indikator dasar yang digunakan untuk mengetahui akses penduduk khususnya penduduk usia sekolah terhadap pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu, yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Semakin tinggi APS berarti semakin tinggi partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. APS sebesar 100 berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu bersekolah, sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut kelompok umur, 2016

| Angka Partisipasi Sekolah | Daerah Tempat Tinggal | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Perkotaan + Pedesaan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5-6 tahun | 34,75 | 37,94 | 36,76 |
| 7-12 tahun | 99,59 | 99,29 | 99,39 |
| 13-15 tahun | 97,75 | 95,97 | 96,60 |
| 16-18 tahun | 84,13 | 73,98 | 78,19 |
| 19-24 tahun | 44,38 | 31,28 | 37,51 |

Sumber: SUSENAS, 2016

Tabel 1 menunjukkan APS penduduk umur 7-24 tahun menurut daerah tempat tinggal. Data Susenas menunjukkan bahwa APS bervariasi antar kelompok umur pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah capaian indikator tersebut. APS paling tinggi adalah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 99,39 persen, selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 96,60 persen; pada kelompok umur 16-18 tahun capaian APS sebesar 78,19 persen; sementara pada kelompok umur 19-24 tahun capaian APS hanya sebesar 37,51 persen. Ini mengindikasikan semakin tinggi umur seseorang semakin kecil akses yang dimiliki terhadap pendidikan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya yaitu tidak tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah terdekatnya atau desakan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Angka Partisipasi Sekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini terjadi hampir pada semua kelompok umur, dimana semakin tinggi kelompok umur penduduk, perbedaan APS daerah perkotaan dan perdesaan semakin besar. Selisih paling besar terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu kelompok umur yang setara dengan jenjang pendidikan

SMA/ sederajat. Dugaan salah satu penyebab rendahnya partisipasi sekolah penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk bersekolah di pedesaan adalah akses penduduk di daerah perkotaan terhadap fasilitas pendidikan menengah atas relatif lebih banyak dan mudah dijangkau di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Selain itu, faktor ekonomi yang relatif lebih tinggi di daerah pedesaan mendorong seseorang pada kelompok umur tersebut untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Salah satu ukuran partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM), APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini berguna untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dengan demikian, APM akan mencapai 100 persen apabila seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016

| Angka Partisipasi Murni | Daerah Tempat Tinggal | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Perkotaan + Pedesaan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD | 92,61 | 95,54 | 94,50 |
| SMP | 76,94 | 71,50 | 73,40 |
| SMA | 69,12 | 59,49 | 63,49 |

Sumber: SUSENAS, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa APM pada setiap jenjang pendidikan di Maluku belum mencapai 100 persen, hal ini berarti bahwa belum ada penduduk yang bersekolah berumur tepat sesuai dengan jenjang pendidikan bersangkutan. APM SD tahun 2016 mencapai 94,50 persen; APM SMP mencapai 73,40 persen; APM SMA sebesar 63,49 persen;. Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pemerintah sesuai dengan Renstra Kemendikbud 2015-2019, capaian APM di Maluku pada tahun 2016 masih belum sesuai target.

3.4 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah melalui Renstra

Kemendikbud 2015-2019 menetapkan rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2019 mencapai 8,8 persen, sementara itu target yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 adalah 8,2 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan hasil data Susenas 2016.

Tabel 3. Rata-rata lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2016

| Wilayah | Jenis Kelamin | | |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Maluku | 9,47 | 9,09 | 9,27 |

Sumber: SUSENAS, 2016

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama sekolah di Maluku pada tahun 2016 adalah 9,27 tahun. Berarti rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Maluku pendidikannya adalah tamat SMP. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,46 tahun, capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah secara nasional yaitu 8,2 tahun.

3.5 TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak penduduk dengan pendidikan tinggi maka akan semakin besar peluang memperbaiki kualitas SDM nya.

Dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah yaitu sebesar 9,87 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal, 2016

| Ijazah tertinggi yang dimiliki | Wilayah | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------------------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Perkotaan + Pedesaan |
| | (1) | (3) | (4) |
| Tidak memiliki ijazah | 5,31 | 13,11 | 9,87 |
| SD/Sederajat | 20,04 | 34,31 | 28,39 |
| SMP/Sederajat | 12,84 | 14,43 | 13,77 |
| SMA/Sederajat | 41,34 | 28,88 | 34,05 |
| SMK/MAK | 5,21 | 1,96 | 3,31 |
| D1/D2 | 0,38 | 0,53 | 0,47 |
| D3 | 1,75 | 0,95 | 1,28 |

| | | | |
|--------------------|-------|------|------|
| D4/S1/S2/S3 | 13,13 | 5,82 | 8,85 |
|--------------------|-------|------|------|

Sumber: SUSENAS, 2016

Ketimpangan jelas terlihat antara daerah perkotaan dan perdesaan, di mana secara umum kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh ijazah yang dimiliki penduduk 15 tahun ke atas di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Lebih dari 40 persen penduduk perkotaan memiliki ijazah SMA dan sebesar 10,6 persen memiliki ijazah perguruan tinggi. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan masyarakat di daerah perdesaan, lebih dari sepertiga penduduk 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 34,31 persen memiliki ijazah SD/ sederajat.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
— Enlighten The Nation —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Jln. Wolter Monginsidi - Passo, Ambon 97232
Telp : (0911) 361320, Email : bps8100@bps.go.id
Homepage : <http://maluku.bps.go.id>